

## B A B III

### PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK AL-FARABI DAN IBNU BAJJAH

#### A. Pemikiran Filsafat Politik al-Farabi

Al-Farabi mengemukakan pendapatnya dalam pemikiran filsafat politik antara lain tentang :

1. Pemerintahan
2. Pandangan tentang negara utama dan macamnya
3. Pembagian masyarakat dan macamnya
4. Politik kenegaraan dan macamnya

#### B. Pemikiran Filsafat Politik Ibnu Bajjah

Ibnu Bajjah mengemukakan pendapatnya dalam pemikiran filsafat politik antara lain tentang :

1. Pandangan negara utama dan pembagiannya
2. Tujuan dan fungsi negara
3. Politik kenegaraan dan macamnya

Demikian kajian yang akan dibahas dalam uraian berikutnya serta rinciannya yang mendalam.

## A. Pemikiran Filsafat Politik al-Farabi

Dalam pemikiran al-Farabi, politik menduduki tempat yang paling penting karena bagian filsafatnya mempunyai tujuan politik. Namun politik bukanlah tujuan dalam dirinya, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia yaitu kebahagiaan dengan memiliki sifat-sifat keutamaan yang dicapai.

Mengenai filsafat politik, H.A. Mustofa di dalam bukunya filsafat Islam menyebutkan bahwa al-Farabi berpendapat, ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan, cara, hidup, watak dan akhlak.<sup>1</sup>

Adapun kebahagiaan manusia dapat diperoleh karena perbuatan/tindakan dan cara hidup yang dijalankan. Kebahagiaan yang hakiki (sebenarnya) tidak mungkin dapat diperoleh sekarang (di dunia ini) melainkan sesudah kehidupan (di akherat). Namun ada kebahagiaan yang misbi seperti kehormatan, kesenangan, kekayaan yang nampak dan dijadikan pedoman hidup.

Sedangkan kebahagiaan sejati dapat di peroleh melalui tindakan-tindakan yang mulia, kebajikan-kebajikan dan

---

<sup>1</sup> H.A. Mustofa, Filsafat Islam, CV. Pustaka Setia Bandung, Cet. I, 1997, hlm. 131.

keutaman-keutamaan. Untuk mewujudkannya melalui kepemimpinan yang tegak dan benar-benar (yang bijaksana). Kepemimpinan yang tumbuh dari keahlian dan pembawaan manusia dapat mengarahkan manusia dalam menegakkan nilai-nilai yang utama dan mewujudkan kesejahteraan. Keahlian dapat disebut pemerintahan dan Raja, adapun politik adalah bentuk dari operasional dari keahlian.

Ada dua problem politik yaitu :

1. Pemerintah atas dasar penegak terhadap tindakan-tindakan yang sadar, cara hidup, disposisi politik. Dasar ini dapat diperoleh untuk kebahagiaan, dan pemerintah atas dasar demikian disebut pemerintah utama, sebagai ciri kata dan bangsa yang tunduk terhadap pemerintah.

Sedangkan dipandang dari kemampuan suatu pemerintahan ilmu politik terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Kemampuan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat universal.
  - b. Kemampuan yang disebabkan adanya ketekunan dalam aktivitas politik dengan harapan menjadi kebijaksanaan.<sup>2</sup>
2. Pemerintahan atas dasar penegakkan terhadap tindakan-tindakan dan watak-watak dalam rangka mencapai sesuatu yang diperkirakan **mendapat** sesuatu kebahagiaan, maka mun -

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 132.

cul beraneka ragam bentuk pemerintahan, apabila yang dikejar kejayaan semata dapat dianggap sebagai pemerintah yang rendah, jika mengejar kehormatan disebut pemerintahan kehormatan, dan pemerintahan kepada apa yang menjadi tujuannya.<sup>3</sup>

Pemerintah dapat menjadi benar-benar baik, jika ada teoritis dan praktis bagi pengelolanya.

Adapun pemikiran al-Farabi tentang filsafat politik-antara lain mengenai :

#### 1. Pandangan-pandangan tentang Negara Utama

Mengenai pandangan al-Farabi tentang negara, banyak mendapat pengaruh dari filsafat kenegaraan Plato dalam bukunya *Republica*, namun al-Farabi telah jauh lebih teliti dan terinci uraiannya dari pada Plato. Untuk menguraikan jalan ini al-Farabi menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul *Arau ahlul madinatil fazilah* (The Virtues of the Citizens of the City).

Dalam buku tersebut al-Farabi mengemukakan pendapatnya tentang negara utama, ada beberapa pandangan al-Farabi tentang negara utama antara lain :

Dalam uraiannya tentang "negara utama" (*al-Madīna - tul-Fadilah*) itu al-Farabi menegaskan bahwa negeri yang utama ialah negeri yang memperjuangkan kemakmuran dan ke-

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 133.

bahagiaan warga negaranya. Untuk itu ia harus berpedoman pada contoh teraturnya hubungan Tuhan dengan alam dan antara isi alam satu sama lain.<sup>4</sup>

Hubungan dunia dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan antara masyarakat dengan Raja, menurut al-Farabi negara yang utama ialah kota (negera) yang warga-warganya tersusun menurut susunan alam besar (makrokosmos) atau menurut susunan alam kecil (mikrokosmos).<sup>5</sup>

Dalam rangka pembentukan negeri utama (barang kali negeri yang sering diimpikan oleh masyarakat negara manapun) adalah suatu negara yang baik dan mendapat ampunan Tuhan, yang terkenal dengan Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur (Q.S. Saba', ayat 15).

الدولة طيبة ورعيفة

Artinya :

Adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.

Konsep tentang negara utama ini, al-Farabi mengibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya bekerja sama sesuai dengan tugas masing

---

<sup>4</sup> Poerwantana, A. Ahmadi, Rosadi, Seluk Beluk Filsafat Islam, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, Bandung, 1994, hlm 138.

<sup>5</sup> H. Ahmad Syadzali, Mudzakir, Filsafat Umum, CV. Husaka Setia, Cet. I, Bandung, 1997, hlm. 169.

masing, yang terkoordinir rapi demi kesempurnaan hidup itu dan penjagaan akan kesehatannya.

Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ atau anggota badan manusia dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dengan kadar kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama, dan dari organ yang banyak itu terdapat organ yang pokok dan paling penting yaitu jantung dan beberapa organ lain yang tingkat kepentingannya bagi tubuh manusia hampir sama dengan jantung yaitu seperti hati sebagai pengendali, sedangkan anggota yang lain berkaitan dan berpengaruh yang bekerja sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing saling membantu jantung.<sup>6</sup>

Demikian pula halnya dengan negara, ia mempunyai warga-warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama dengan yang lain. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala, dan masing-masing mempunyai bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala.<sup>7</sup>

Tidak semua warga berhak menjadi kepala negara utama, untuk tugas ini diperlukan dua syarat yaitu :

---

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet. V, PT. Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 53.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 35.

Pertama : secara natural ia dipersiapkan, untuk itu dan kedua : memiliki ide atau konsep dan kemampuan kehen - dak artinya, orang yang sempurna, sehingga ia mampu berko - munikasi dengan tuhan nya melalui wahyu yang diturunkan ke - pada kepala negara utama.<sup>8</sup>

Menurut al-Farabi, kepala bagi negara yang utama i - tu haruslah pemimpin yang arif dan bijaksana yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian yang lain masih perlu ditumbuhkan melalui pengajaran, pendidikan pengama - tan dan pengawasan amat diperlukan.<sup>9</sup>

Adapun sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus di miliki atau diberikan kepada kepala negara utama yang me - rupakan wataknya yaitu :

- a. Sehat badannya
- b. Anggota-anggota badannya sehat dan lengkap
- c. Memiliki ingatan yang kuat atau daya pemahamannya baik
- d. Kecerdasan yang tinggi atau intelektualitasnya tinggi
- e. Tanggapan yang tepat
- f. Tutar kata yang baik
- g. Cinta kepada ilmu
- h. Mengisi diri dengan kejujuran dan dapat dipercaya
- i. Membela keadilan

---

<sup>8</sup> Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam, Bulan Bintang Cet. III, Jakarta, 1992, hlm. 51.

<sup>9</sup> H Munawir syadzali, Op.Cit, hlm. 55 - 56.

- j. Kuat kemauan
- k. Kuat cita-cita
- l. Tidak rakus dan menjahui dari kelezatan-kelezatan jasmani (bersifat zuhud)<sup>10</sup>

Oleh karena sangat jarang ada seorang yang memiliki kualitas luhur tersebut, kalau terdapat lebih dari satu, maka dipilih satu yang menjadi kepala negara, sedangkan yang lain menunggu giliran. Tetapi kalau misalnya tidak terdapat seorangpun yang memiliki secara utuh dua belas atribut tersebut, pemimpin negara dapat dipikul secara kolektif antara sejumlah warga negara yang termasuk tugas pemimpin, negara tersebut tetap tidak mempunyai raja, padahal suatu negara tanpa seorang raja tidak akan tahan lama dan akan mengalami kehancuran.

Kepala negara utama, menurut al-Farabi berperan sebagai guru (Mu'alim), pembimbing, pengendali dan pembuat undang-undang dan peraturan. Hal ini karena manusia pada wataknya tidak dapat dengan sendirinya mengetahui kebahagiaan dan hal-hal lain yang pantas diketahui, sehingga ia perlu seorang guru pembimbing yang mampu berhubungan dengan akal aktif untuk menerima makrifat dan wahyu.<sup>11</sup>

Di samping negara utama, terdapat empat jenis nega-

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 55 - 56.

<sup>11</sup> Ahmad Daudy, Op.Cit, hlm. 52.

ra lain yang merupakan lawan-lawan dari negara utama tersebut yaitu :

1. Negara bodoh (al-Madinatul Jahilah ) ialah suatu negeri dimana penduduknya tidak mengenal kebahagiaan, <sup>السعادة</sup> ini tidak terlintas didalam hatinya, walaupun dijumpukan atau diingatkan, maka mereka tidak lain mempercayainya dan tidak mencarinya, dikatakan baik menurut mereka adalah, badan sehat, cukup harta, dapat memperoleh kesenangan materiil dan sebagainya, sedang apa yang dikatakan kesengsaraan tidak lain hanyalah kebalikan itu.<sup>12</sup>

Adapun negara bodoh ini **dibagi** oleh al-Farabi menjadi enam macam yaitu:

- a. Negeri darurat (asal cukup) yaitu suatu negeri yang penduduknya hanya mendapatkan minuman dari kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Negeri kapitalis (gila harta) yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kekayaan dan harta benda.
- c. Negeri gila hormat (megah) yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kehormatan saja.
- d. Negeri hawa nafsu (**khissah wal syahwah**) yaitu negeri yang mementingkan kekejian dan berfoya-foya.

---

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, PT. Bulan Bintang, Cet.V, Jakarta, 1991, hlm. 97.

e. Imperialis (taqhallub) yaitu negeri yang hanya ingin menaklukkan negeri lainnya saja.

f. Negeri anarkis (tak berhukum) yaitu negeri yang penduduknya masing-masing ingin bebas menjalankan keinginan-masing-masing.<sup>13</sup>

2. Negeri fasik ialah suatu negeri dimana penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan dan akal fa'al, seperti negeri utama. Akan tetapi perbuatan-perbuatan mereka sama dengan perbuatan negeri bodoh. Jadi mereka berbuat lain dari pada yang diucapkan dan dipercayai (munafik).

3. Negeri yang berubah-ubah ialah suatu negeri dimana penduduknya mula-mula mempunyai pikiran dan pendapat yang samaseperti yang dimiliki oleh negeri penduduk utama. Akan tetapi kemudian mengalami kerusakan pada pikiran dan pendapat tersebut.

4. Negeri sesat ialah negeri dimana penduduknya mempunyai pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan dan akal fa'al - (akal aktif), meskipun demikian kepala negeri itu menganggap dirinya mendapat wahyu, kemudian ia menipu orang-orang dengan kata-kata dan perbuatannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H. Hasbullah Bakry, Disekitar Filsafat Skolastik Islam, PT. Tinta Emas, Cet. IV, Jakarta, hlm. 39.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, Loc.Cit. hlm. 97.

Dengan demikian, al-Farabi memberikan contoh tentang hubungan perjanjian yang dilakukan dengan manusia itu terjadi karena adanya faktor kelemahan pada masing-masing anggota yang bersangkutan. Bila ada salah seorang dari mereka jadi lebih kuat, maka dia akan berusaha merubah perjanjian yang dibuat menurut kemampuan yang dimiliki waktu itu.

## 2. Pembagian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain.

Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris adalah "Society" yang berasal dari kata "Socius", artinya kawan, sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu "Syirk" artinya bergaul, adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh perseorangan, melainkan satu kesatuan manusia yang menjadi kekuatan dalam lingkungan sosial. Manusia sejak lahir sampai mati sebagai anggota masyarakat saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Demikianlah, bermasyarakat adanya interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, PT. Usaha Nasional, Surabaya, 1986, hlm. 60.

Jadi masyarakat adalah kelompok manusia yang tetap, cukup lama hidup dan bekerjasama, berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu.

Mengenai terjadinya masyarakat al-Farabi berpendapat bahwa : Pertama : masyarakat timbul dengan adanya kekuasaan seseorang yang kuat (raja atau panglima) yang mempersatukan dan memimpin masyarakat itu. Kedua : disebabkan persamaan keturunan atau hubungan darah di antara warganya (keluarga, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh). Ketiga : masyarakat itu dapat terbentuk dengan adanya hubungan perkawinan diantara beberapa keluarga.<sup>16</sup>

Adapun untuk pengaruh iklim atas watak dan perilaku manusia al-Farabi berpendapat, bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, amat dingin dan sedang, juga faktor makanan. Menurut al-Farabi, faktor-faktor tersebut banyak berpengaruh dalam pembentukan watak, pola pikir, perilaku

---

<sup>16</sup> H. A. Mustofa, Op.Cit, hlm. 163.

orientasi atau kecenderungan, dan adat istiadat. Oleh karena itu, al-Farabi melepaskan harapan untuk mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman diantara umat manusia.<sup>17</sup>

Menurut al-Farabi, tujuan masyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan tidak saja materiil tapi juga spiritual, tidak saja di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti. Pendapat al-Farabi ini memperlihatkan pengaruh keyakinannya terhadap agama Islam dan sebagai seorang muslim.

Dari kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, lahirilah berbagai macam masyarakat, diantaranya ada yang merupakan masyarakat sempurna dan ada yang tidak sempurna.

Sedangkan masyarakat yang sempurna adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan diantara unsur - unsurnya seperti keseimbangan yang ada dalam diri manusia. Perbedaannya hanyalah kalau unsur-unsur masyarakat itu mempunyai kebebasan individual lebih besar, maka dalam diri manusia unsur-unsurnya itu lebih dikuasai dan diperintah oleh pusatnya.

Menurut al-Farabi masyarakat sempurna dibagi menja-

---

<sup>17</sup> H. Munawir Syadzali, Op.Cit, hlm.51.

di tiga macam :

1. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama, yaitu perserikatan Bangsa-bangsa ( Dunia Internasional).
2. Masyarakat sempurna sedang (pertengahan) adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni disatu wilayah dari bumi ini (satu bangsa) yaitu negara nasional.
3. Masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni, satu kota yaitu Negara kota.<sup>18</sup>

Dari tiga pendapat al-Farabi tentang masyarakat sempurna tersebut, maka negara kota/masyarakat kecil merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Alasan al-Farabi hal itu karena pada waktu itu ia hidup pada zaman di kala Islam telah terbagi-bagi semacam negara-negara nasional yang masing-masing terdiri dari banyak kota dan desa serta berwilayah luas. Dalam hal ini pendapat al-Farabi dapat dianggap sebagai bukti bahwa dalam idealisasi pada politik dia tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan politik pada zaman dia hidup.

Adapun masyarakat yang tidak sempurna menurut al-Farabi, adalah penghidupan sosial setingkat desa, kampung,

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 51.

lorong dan keluarga, dan diantara ketiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu, maka kehidupan di dalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat yang tidak sempurna.<sup>19</sup>

Sedangkan keluarga merupakan masyarakat terkecil dari kehidupan sosial, dimana keluarga terdiri dari aspek hubungan antara suami istri, bapak dengan anak-anaknya - mempererat hubungan kekerabatan dan memperinci hak dan kewajiban setiap individu terhadap kerabat terdekat dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian masyarakat yang sempurna dapat dikatakan masyarakat yang bernegara/berpemerintah, dimana dalam suatu negara terdapat masyarakat dan Kepala Negara sebagai pemimpin masyarakat dan negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dalam segala hal dan masyarakat yang demikian dapat disebut dengan masyarakat yang ideal.

Adapun masyarakat yang ideal adalah konsep tentang masyarakat yang terbaik dan dicita-citakan oleh negara, sehingga dapat memenuhi harapan-harapan dan keinginan anggotanya.

---

<sup>19</sup> H. Munawir Syadzali, Op.Cit, hlm. 52.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, Membangun Masyarakat Islam, PT.Pustaka Firdaus, Cet.I, Jakarta, 1994, hlm.13.

Sedangkan masyarakat yang tidak sempurna, dapat dikatakan juga masyarakat kecil yang diawali dari keluarga dalam lingkup pergaulan sosial yang sangat kecil didalam rumah maupun di sekitar lingkungan rumah.

Perkembangan dari tidak sempurna kepada sempurna itu ialah bertingkat-tingkat, mula-mula masyarakat manusia/keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong bagian dari masyarakat kampung dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat kota kemudian menuju yang sempurna berpemerintah. terbentuknya kampung dan desa, sangat diperlukan negara kota, hanya bedanya kampung bagian dari negara kota, sedangkan desa hanya pelengkap untuk melayani kebutuhan negara kota. Dari ketiga unit tersebut dianggap unit pergaulan sosial yang tidak merupakan masyarakat sempurna, karena tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan para warganya secara mandiri dan berswasembada, baik dalam kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual.

### 3. Politik Kenegaraan

Dalam soal politik kenegaraan al-Farabi banyak menguraikannya dalam bukunya "as siyasatul madaniyah dan araaul ahlil madinah".

Dalam buku tersebut al-Farabi mengemukakan pendapat bahwa pokok-pokok filsafat politik kenegaraannya adalah Autokrasi dimana seorang penguasa, seorang raja

(kepala Negara) berkuasa mutlak untuk mengatur negara, Dalam hal ini al-Farabi lebih menitik beratkan pada kepala pemerintahannya (Kepala Negara). Kepala negaralah (seorang raja) yang menjadi sumber segala peraturan dan keharmonisan didalam masyarakat.

Nampaknya pendapat al-Farabi tentang politik kenegaraan ini semuanya berpusat pada seorang kepala negara segala urusan masyarakat yang diperintahnya diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah (kepala negara). Jadi, apabila suatu negara menjadi jelek maka penyebabnya adalah seorang kepala negara yang jelek, dan apabila suatu negara itu mencapai kebahagiaan, sejahtera dan mencapai kemakmuran serta menjadi negara yang baik maka, kepala negara tersebut baik.

Di sini dapat dilihat bahwa, peranan seorang kepala negara itu sangat menentukan sekali baik buruknya suatu negara, karena seorang kepala negara sepenuhnya memerintah dan mengatur negara tersebut.

Mengenai pimpinan negara al-Farabi berpendapat bahwa, tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi Kepala Negara hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang sempurna, tentunya dari kelas yang tertinggi, dibantu oleh orang-orang pilihan juga dari kelas yang sama. Mereka tunduk dibawah pimpinan kepala negara, dan atas nama dia memimpin warga-warga dari kelas dibawahnya, hal itu berarti

warga-warga negara selain kepala negara tidak sama ting -  
katannya satu sama lain. Tinggi dan rendahnya tingkat me-  
reka ditentukan oleh dekat jauhnya dari kepala negara.<sup>21</sup>

Tentang pemimpin ini al-Farabi menguraikan **bahwa**  
negara terbaik ialah negara yang dikepalai oleh seorang  
filosof. Mengapa demikian, karena baik para Nabi / Rosul  
maupun para filosof sama-sama dapat berkomunikasi dengan  
akal fa'al yaitu akal kesepuluh (Malaikat). Perbedaannya,  
kalau Rosul komunikasinya dengan akal kesepuluh terjadi  
melalui perantara imajinasi (al-Muthakhayyilah) yang sama  
kuat, sedangkan para filosof berkomunikasi dengan akal ke  
sepuluh melalui akal mustafat, yaitu akal yang mempunyai  
kesanggupan dalam menangkap inspirasi dari akal kesepuluh  
yang ada diluar diri manusia.<sup>22</sup>

Dalam pemikiran politik ini al-Farabi banyak dipe-  
ngaruhi oleh filosof Yunani, Plato. Adapun gagasan Plato  
untuk menciptakan suatu negara ideal adalah suatu negara  
yang bebas dari para penguasa dan pemimpin yang rakus dan  
jahat, Ia berpendapat bahwa seorang filosof yang dapat di  
percaya mengatur segala urusan pemerintahan, karena fi -  
losoflah yang mampu berpikir secara filsafati yang dapat

---

<sup>21</sup> H. Munawir Syadzali, Op.Cit, hlm. 55.

<sup>22</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid I, PT. Ichtiar Baru,  
Van Hoeve, Jakarta, hlm. 332.

disebut arif dan bijaksana.<sup>23</sup>

Dengan demikian, politik kenegaraan al-Farabi lebih menitik beratkan pada obyektif sesuai dengan idealismenya, dalam hal ini kepala negara yang menjadi penentu dalam suatu negara, bukan didasarkan pada sistem pemerintahan. Maka dari itu al-Farabi berpendapat bahwa Nabi/Rosul dan filosof adalah dua pribadi yang paling tepat dalam memimpin suatu negara. Ungkapan ini bukan secara lahiriyah mereka berdua benar-benar menjadi kepala negara, otomatis bila kepala negara itu berjiwa Nabi/Rosul atau filosof akan menjadi arif dan bijaksana, yang pada gilirannya akan mampu mendidik dan menarik rakyat kepada jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al-Farabi ingin menggambarkan pula pentingnya bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktivitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani yang merupakan aktualisasi pemerintahan jahiliah, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat.

#### B. Pemikiran Filsafat Politik Ibnu Bajjah

Pada hakekatnya pemikiran filsafat Ibnu Bajjah hampir sama dengan pemikiran filsafat politik al-Farabi dimana Ibnu Bajjah juga menyetujui konsep politik yang dibuat

---

<sup>23</sup> J.H. Repar, Filsafat Politik Plato, C.V. Rajawali, Cet. I, Jakarta, 1998, hlm.88.

oleh al-Farabi, seperti dalam hal pembagian masyarakat sempurna dan tidak sempurna dan menyetujui dengan anggapan al-Farabi bahwa individu yang berbeda dari sebuah bangsa memiliki watak yang berbeda pula sebagian dari mereka ada yang lebih suka memerintah dan sebagian lebih suka diperintah, adapun pemikiran filsafat politik Ibnu Bajjah adalah sebagai berikut :

1. Pandangan-pandangan tentang negara utama

Pandangan Ibnu Bajjah tentang negara utama, beliau menyamakan atau menyebut negara utama dengan negara ideal, Negara utama menurut Ibnu Bajjah lebih menekankan pada masyarakat dan penduduk, sedangkan al-Farabi hanya menekankan pada sifat pengaturan negara. Namun keduanya sependapat, negara utama yang sempurna hanya satu, yaitu negara yang memiliki persyaratan tertentu, sedangkan yang selainnya adalah negara yang kurang atau jelek.<sup>24</sup>

Sedangkan syarat berdirinya suatu negara adalah :

- a. Harus ada daerahnya atau wilayahnya yang tertentu yaitu yang dikenal dengan sebutan "daerah negara".
- b. Dalam daerah itu harus ada rakyatnya atau masyarakatnya yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, yang dikenal dengan sebutan "rakyat negara".
- c. Harus ada kekuasaan dan pemerintahannya yang berdaulat

---

<sup>24</sup> Ahmad Daudy, Op.Cit, hlm. 140.

atau yang berkuasa yang meliputi daerah dan rakyatnya itu yang dikenal sebagai pemerintah negara.

d. Harus ada pengakuan dari negara-negara lain atas negara itu, yang dikenal sebagai pengakuan negara (tapi itu tidak mutlak).

e. Harus ada tujuannya, yang dikenal sebagai tujuan negara (hal ini hanya merupakan syarat tambahan saja untuk melengkapi).<sup>25</sup>

Negara yang memiliki syarat tertentu itu adalah negara yang mampu menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakatnya (rakyatnya) dan mendapat ampunan Tuhan, serta mencapai tujuan negara yaitu negara yang makmur dan tentram selalu mendapatkan kebahagiaan.)

Diantara ciri ini negara utama adalah dimana negara yang para warganya tidak memerlukan lagi kepada dokter dan hakim, sebabnya mereka saling berkasihan dan menghormati sesamanya, melatih diri hanya untuk melakukan perbuatan yang baik serta makan apa yang bermanfaat bagi tubuh, kehidupan yang demikian menimbulkan persaudaraan dalam pergaulan serta kesehatan jasmani dan rohani. Semua kegiatan warga negara diarahkan untuk kesempurnaan negara, tidak untuk merusak dan permusuhan.

---

<sup>25</sup> Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, PT. Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1987, hlm. 17.

## 2. Tujuan Negara

Negara merupakan suatu wilayah yang didiami atau sebagai tempat tinggal suatu persekutuan manusia yang saling bekerjasama dan dipersatukan oleh suatu rasa persamaan yang dinamakan negara, dalam hal ini suatu negara memiliki seorang kepala negara atau pemerintah.

Selanjutnya tujuan negara menurut Ibnu Bajjah adalah identik dengan tujuan hidup manusia, karena pandangan Ibnu Bajjah tentang negara menekankan pada masyarakat dan penduduk. Adapun tujuan hidup manusia didunia ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya bisa dicapai dengan adanya usaha aktifitas yang bersumber pada kemauan bebas dan pertimbangan akal. Perbuatan dan aktifitas manusia adakalanya didorong oleh naluri yang juga tidak berbeda yang terdapat pada hewan, kecuali itu, manusia memiliki kelebihan dengan adanya naluri insani yang tidak terdapat pada hewan, dengan naluri ini manusia dapat menaklukkan aktifitas dan perbuatan berdasarkan pertimbangan akal, bebas dan rangsangan naluri hewani.<sup>26</sup>

Sedangkan tujuan hidup manusia yang lain yaitu :

- a. Tujuan untuk merawat, fisik semata, seperti makan, berpakaian dan lain-lain. Tujuan pertama ini mengharuskan diperhatikan oleh seseorang demi hidupnya.

---

<sup>26</sup> Ahmad Daudy, Op.Cit, hlm. 142.

- b. Tujuan untuk mewujudkan citra rohani yang khas yang memungkinkan seseorang memperoleh ketentraman dan berfikir dan kesenangan perasaan, seperti memakai perhiasan, pakaian cantik menarik, dan sebagainya, ini merupakan indikasi bagi keutamaannya sebagai manusia.
- c. Tujuan untuk mewujudkan citra rohani umum yang memungkinkan mencapai kesempurnaan untuk dapat berhubungan dengan akal aktif (akal fa'al) yaitu akal kesepuluh yang merupakan limpahan dari Tuhan, sehingga dengan itu ia memperoleh kebahagiaan hakiki, tujuan ini merupakan tujuan yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan yang lebih sempurna.<sup>27</sup> Pada hakekatnya tujuan negara adalah tujuan umum dari semua warga negaranya, yaitu kesehatan, kemerdekaan, kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan, keselamatan, kebudayaan, semua itu adalah pokok-pokok tujuan negara. Negara tidak cukup bertujuan keamanan saja atau kemerdekaan saja atau keadilan saja, betapapun pentingnya itu satu per satu. Negara sebagai perwujudan kehendak pergaulan manusia yang tersusun teratur harus juga mewujudkan hajat hidup manusia. Tujuan negara pada umumnya dapat diketahui dari undang-undang dasar negara dari kementerian-kementriannya. Undang-undang dasar negara adalah undang-undang pokok yang menyatakan segala

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 143

tata susunan dan tata pemerintahan yang menentukan haluan negara. Jadi tujuan negara ini mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya (rakyat yang dipimpin).

### 3. Politik Kenegaraan

Dalam politik kenegaraan Ibnu Bajjah menulis sejumlah risalah kecil mengenai pemerintahan dewan-dewan dan pemerintahan negara kota, tetapi buku yang sekarang masih dibaca "Tadbir al Mutawahid" (rezim satu orang).

Dalam buku tersebut Ibnu Bajjah berpendapat bahwa, manusia yang memerintah secara sendirian itu (mutawahid atau filosof yang berfikir tajam) harus selalu berada lebih tinggi dari orang-orang lain pada kesempatan-kesempatan tertentu, meskipun menghindarkan orang lain itu sendiri tidak diinginkan, namun hal itu diperlukan untuk mencapai kesempurnaan. Dia juga menasehati, agar para filosof menemui masyarakatnya hanya pada beberapa kesempatan tertentu dalam waktu sebentar saja dan dia harus pindah ke negara-negara tempat ia memperoleh pengetahuan per pindahan itu harus dilakukan dibawah hukum-hukum ilmu politik.<sup>28</sup>

Menurut Ibnu Bajjah, memang manusia itu adalah ma-

---

<sup>28</sup> MM. Syarif, Para Filosof Muslim, PT. Mizan, Cet VII, Bandung, 1994, hlm. 166

Manusia berbudaya, karena berbudaya itu adalah tabiatnya, tetapi pada hakekatnya hidup memencilkan diri sendiri itulah yang lebih baik, hidup sendirian dan merenungkan ilmu pengetahuan akan mendekatkan orang kepada akal fa'al dengan demikian akan terlimpahkan kepadanya ilmu dari akal fa'al tersebut.<sup>29</sup>

Dari segi ini, maka "penyendirian"nya Ibnu Bajjah mirip sekali dengan "orang bijaksana"nya al-Farabi yang dapat berhubungan dengan akal fa'al. Karena dalam "penyendirian" yang demikian sikapnya tidak banyak jumlahnya dalam masyarakat, Ibnu Bajjah memisalkan mereka seperti tumbuhan kecil yang hidup diantara pepohonan besar yang beraneka jenis, sebagai mufasir atau perantau yang memiliki watak budi dan tingkah laku yang berbeda dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat yang mengitari, mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Selalu menjaga kesehatan untuk itu mereka memerlukan sedikit pengetahuan tentang kesehatan agar dapat merawat diri.
- b. Selalu makan apa yang diperlukan tubuh.
- c. Sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup yang menyangkut sandang, pangan dan tempat tinggal, karena kebutuhan, yang demikian ini bukan tujuan utama bagi kehidupannya.

---

<sup>29</sup>Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Islam, PT. Bumi Aksara, Cet. I, Jakarta, 1991, hlm. 83.

- d. Bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan menjauhi orang-orang yang mementingkan kehidupan duniawi semata bergaul dengan mereka ini hanya sekedar saja.
- e. Mengutamakan ilmu-ilmu teoritis dan meninggalkan ilmu praktis, karena kurang diperlukan sebagai tujuan hidup seperti ilmu perdagangan.
- f. Melakukan amal baik atas kemauan sendiri atas pertimbangan akal.
- g. Menjauhkan diri dari kehidupan sufi.<sup>30</sup>

Pendapat Ibnu Bajjah yang lain, yang dimaksud dengan menyendiri (mengisolir diri) bukanlah dalam arti dzati, yaitu menyendiri dari orang banyak, hal demikian tidaklah baik bagi dirinya. Hidup menyendiri untuk merenungkan obyek-obyek ilmiah (ma'qulat).<sup>31</sup> Jadi manusia harus mampu secara spiritual untuk menyendiri merenungkan ma'qulat sesuai dengan sifat yang terdapat dalam dirinya yaitu hayawaniah dan insaniah, maka untuk mencapai sifat-sifat insaniah yang sempurna diperlukan pengasingan diri secara spiritual. Jika menyendiri mendiami suatu negara, maka negara itu disebut negara utama (al-madinah al-fadzilah), dan jika tidak maka negara itu disebut dengan negara bobrok (al-madinah al-naqishah). Bagi Ibnu Bajjah tiap-tiap orang mampu me -

---

<sup>30</sup> Ahmad Daudy, Loc.Cit, hlm. 143.

<sup>31</sup> Yunasril Ali, Op.Cit, hlm. 84.

nempuh jalan tersebut, dan tidak ada yang menghambatnya, kecuali meremehkannya dirinya sendiri dan ketundukannya terhadap keburukan-keburukannya masyarakat. Kalau sekiranya tiap - tiap orang bisa meninggalkan sikap tersebut tentulah manusia keseluruhannya bisa mencapai kesempurnaan.<sup>32</sup>

Ibnu Bajjah juga mengatakan, jika dalam suatu negara atau masyarakat terdapat banyak para "menyendiri" yang berciri sikap tersebut diatas, maka negara atau masyarakat tersebut tidak lagi memerlukan para hakim dan para dokter, juga untuk zaman ini para polisi. Hal ini karena anggota masyarakat atau warga negara terdiri dari orang-orang yang berakhlak luhur, tidak suka melanggar hukum, berbuat keji dan mungkar, serta memilih makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Mereka semua adalah orang-orang bijaksana dan ilmuwan.<sup>33</sup> Boleh jadi kita akan mengira bahwa Ibnu Bajjah, memintak pada seseorang untuk menjahui masyarakat sama sekali, yaitu "uzlah" (penyendirian) seperti yang diperintahkan orang-orang sufi akan tetapi, sebenarnya uzlah yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah bukanlah menjahui manusia, melainkan tetap juga berhubungan dengan masyarakat. Hanya sa-

---

<sup>32</sup> Porwantana, A. Ahmadi, Rosali, Op.Cit, hlm.189

<sup>33</sup> Ahmad Daudy, Loc.Cit, hlm. 142.

ja ia harus selalu bisa menguasai dirinya serta hawa nafsunya dan tidak terbawa oleh arus keburukan-keburukan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain berpusat pada dirinya sendiri dan selalu merawat bahwa dirinya adalah panutan dan pembuat aturan-aturan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam didalamnya.

Dari risalah al wada' Ibnu Bajjah memberikan dua fungsi alternatif negara :

- a. Untuk menilai perbuatan rakyat guna membimbing mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan. Fungsi ini paling baik dilaksanakan didalam negara ideal oleh seorang penguasa yang berdaulat.
- b. Fungsi alternatif yang kedua ini yaitu merancang cara-cara mencapai tujuan-tujuan tertentu persis sebagaimana seorang penunggang, sebagai latihan pendahuluan, mengendalikan tali kekang demi menjadi penunggang yang mahir.<sup>34</sup>

Ini merupakan fungsi pelaksana-pelaksana negara - negara yang tidak ideal. Dalam hal ini sang penguasa disebut rais (pemimpin), sang pemimpin menerapkan di negara itu suatu sistem tradisional untuk menentukan seluruh tindakan rakyat.

Menurut Ibnu Bajjah konstitusi harus disusun oleh

---

<sup>34</sup> MM. Syarif, Loc.Cit, hlm. 166.

kepala negara, dalam hal ini yang dimaksud kepala negara adalah seorang nabi, tetapi Ibnu Bajjah tidak menyebutkan identitas diri secara terperinci. Alasan Ibnu Bajjah menunjuk kepada negara oleh seorang nabi, karena manusia tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali, umat yang dibawa oleh para rosul dari Tuhan yang maha tinggi (yaitu, hukum Tuhan atau Syari'ah). Mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan tidak akan sesat.<sup>35</sup>

Dengan demikian seorang kepala negara berhak sepenuhnya dalam mengatur negaranya dan membuat undang-undang sebagai landasan bernegara serta mengatagorikan seorang Nabi/Rosul yang paling baik sebagai kepala negara, karena seorang Nabi/Rosul mendapat petunjuk langsung dari Tuhan-Nya melalui akal fa'al (akal aktif).

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 167.